

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pengolahan data statistik, deskripsi, analisis, dan interpretasi data yang telah dilakukan dan diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara dana perimbangan dengan kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 2006 – 2010.

Hal ini sesuai dengan hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh peneliti. Kedua variabel tersebut memiliki korelasi negatif sebesar  $-0,34$  dan signifikan sebesar  $3,22$ , yakni apabila dana perimbangan mengalami peningkatan, akan mempengaruhi penurunan kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa. Sedangkan berdasarkan koefisien determinasinya, dana perimbangan pun mempengaruhi kinerja keuangan walaupun dari seluruh hasil perhitungan menunjukkan bahwa tingkat korelasi antara kedua variabel masih tergolong dalam kategori rendah.

Berdasarkan hal tersebut, penerimaan dana perimbangan yang semakin besar menggambarkan keadaan suatu daerah yang masih rendah potensinya untuk meningkatkan kinerjanya, terutama dalam peningkatan pendapatan asli daerah yang tergambar dalam rasio efektivitas. Terlihat bahwa masih terdapat ketergantungan akan bantuan dari pemerintah pusat untuk wilayah

Pulau Jawa walaupun tingkatannya masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan Pulau Jawa tergolong wilayah yang sangat potensial dalam urusan pengembangan wilayahnya. Pulau Jawa adalah pulau yang memiliki tingkat kemajuan pembangunan tertinggi di Indonesia. Kegiatan ekonomi di Indonesia terkonsentrasi di wilayah ini. Kekayaan sumber daya alam, angkatan kerja usia muda yang berpendidikan, pasar domestik yang luas yang tumbuh secara cepat, digabungkan dengan kondisi sarana dan prasarana yang lengkap menjadi faktor keunggulan Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ini berada pusat pemerintahan, yang merupakan pusat kegiatan politik dan administrasi negara.

Dana perimbangan yang seringkali mendominasi penerimaan beberapa daerah yang disebabkan karena kurang maksimalnya kinerja yang dicapai. Keberadaannya yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah serta meminimalkan terjadinya defisit sehingga apabila dana perimbangan yang tercermin tergolong besar, akan menyebabkan ketergantungan akan bantuan pusat untuk meningkatkan kinerja keuangan daerahnya.

## **B. Implikasi**

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara dana perimbangan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah yang dilihat dari rasio efektivitas. Rasio efektivitas merupakan gambaran mengenai kondisi penerimaan pendapatan asli daerah yang merupakan salah satu faktor yang berperan besar dalam perubahan kinerja keuangan suatu daerah. Dengan

demikian, bisa dikatakan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh di mana apabila penerimaan dana perimbangan tersebut tinggi, maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan mengalami penurunan dikarenakan terlalu bergantungnya suatu daerah terhadap bantuan dari pusat.

Hal ini menggambarkan di tengah kepesatan potensi Pulau Jawa sebagai wilayah yang tingkat kemajuannya cukup tinggi, masih terdapat sedikit ketergantungan beberapa daerahnya terhadap dana perimbangan. Dengan kata lain, masih ada beberapa daerah di Pulau Jawa yang memiliki potensi rendah dalam meningkatkan kinerjanya. Penyebabnya antara lain daerah yang terkena bencana dalam jangka panjang (misalnya Kabupaten Sidoarjo) dan daerah-daerah yang terletak didaerah pedesaan atau jauh dari pusat perniagaan. Penyebab lainnya pun dikarenakan pendapatan asli daerah yang rendah sehingga kinerja cenderung rendah pula disertai dengan penyalahgunaan dana yang menyebabkan kondisi keuangan daerah semakin memburuk.

### **C. Saran**

Untuk mengevaluasi kondisi yang telah dicapai berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, peneliti memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja keuangan daerahnya, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah daerah, diharapkan untuk meningkatkan penerimaan yang dihasilkan dari pendapatan asli daerah sendiri sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat pun tidak terlalu besar.
2. Bagi pemerintah daerah, diharapkan untuk mengelola keuangannya dengan baik agar dana perimbangan yang pada awalnya digunakan untuk menunjang kekurangan daerah, justru malah terpakai untuk belanja pegawai.
3. Bagi pemerintah pusat, diharapkan adanya suatu prosedur yang jelas dan terarah mengenai pengalokasian dan penggunaan dana perimbangan yang disalurkan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana perimbangan.
4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan sampel dari pulau lain dengan menggunakan beberapa rasio lain yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah seperti rasio efisiensi, rasio kemandirian, rasio pertumbuhan, DSCR, dan sebagainya.